



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

TAHUN **2019**

**PIB
SERVICE**



BUKITTINGGI 2018



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Perwira No. 33 ☎ (0752) 626633 Kode Pos 26136 Bukittinggi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 188.45-55 /DPMPTSPPTK-BKT/2018

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

KERJA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
- KEDUA : Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya tahunan.
- KETIGA : Kepala Dinas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
3. Kepala Bappelitbang Kota Bukittinggi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019. Rencana Kerja (Renja) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan program /kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya Kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Penanaman Modal Bukittinggi.

Bukittinggi, 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI



SYAHRIZAL, ST
NIP. 19611212 198602 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II	6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	40
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja	42
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV	46
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V	58
PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel T.C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSPPTK s/d Tahun 2018	8
Tabel T.C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017	21
Tabel T.C-31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi	28
Tabel T.C-32 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 2019	37
Tabel T.C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota BUkittinggi	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, perindustrian dan ketenagakerjaan selama 1 (satu) tahun.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPPTK Tahun Lalu dan capaian Renstra DPMPTSPPTK
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting mengenai pelaksanaan dan ketersediaan anggaran;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan Pagu Anggaran dan Realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

a. Pagu Tahun Anggaran 2017 termasuk Perubahan Anggaran adalah sebesar Rp. 9.557.426.552,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 6.336.475.462,-
- Belanja Langsung Rp. 3.220.951.090,-

b. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 8.926.695.288,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua) atau 93,41% dari pagu anggaran dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp.6.021.061.059,-
(95,02%)
- Belanja Langsung Rp.2.905.634.229,-
(90,21%)

Sedangkan untuk Anggaran Tahun 2018 dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp. 8.012.281.386,- (Delapan milyar dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dimana Belanja Tidak Langsung Rp. 4.545.609.485,- (Empat milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.466.671.901,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah).

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2018 (tahun berjalan)* dapat dijelaskan pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Non Urusan									
	Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50.0%
	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah surat yang terkirim	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	175 bh, 230 bh, 4 bh, 12 bulan	175 bh, 230 bh, 4 bh, 36 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	72 bulan	36 rek/12 bulan	36 rek/12 bulan	36 rek/12 bulan	100%	48 rek/12 bulan	48 rek/12 bulan	50%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	100%	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	7 unit roda 4 & 14 unit roda 2	50%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa cleaning service dan pembelian alat kebersihan	72 bulan/60 unit	12 bulan/22 jenis	12 bulan/22 jenis	12 bulan/22 jenis	100%	12 bulan/12 jenis	12 bulan/12 jenis	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan/peralatan/perlengkapan kantor (bulan)	72 bulan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	50%
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	75 jenis	36 jenis	36 jenis	36 jenis	100%	31 jenis	31 jenis	50%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah yang dijilid dan fotocopy	72 bulan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	7 jenis, 26274 lmr, 86 bh	7 jenis, 26274 lmr, 86 bh	50%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	60 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis	11 jenis	50%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	72 bulan	90%	90%	90%	100%	90%	90%	50%
	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	50%
		Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (security)	Honor security	48 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	25%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur (%)	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50.0%
		Pengadaan Perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	7 jenis	1 jenis	3 jenis	7 jenis	233%	2 jenis	10 jenis	143%
		Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	11 jenis	1 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	1 jenis	6 jenis	55%
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah dokumen DED Kantor DPMPTSPPTK	1 gedung kantor	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25%
		Pengadaan Meubelair	Jenis meubelair yang diadakan	5 item	-	4 jenis	4 jenis	100%	-	-	80%
		Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor (unit)	2 unit	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	80%	50%	60%	60%	100%	65%	65%	81%
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah petugas yang profesional di bidang penanaman modal	30 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	0	12 orang	40%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	6 dokumen	33%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun tepat waktu	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	4 dokumen	33%
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu	42 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	-	14 dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
	Penanaman Modal									
	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat (%)	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	300 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	24 laporan	124 laporan	41%
	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah izin yang dikelola secara on line	86 jenis	100%	86 jenis	86 jenis	100%	86 jenis	86 jenis	100%
	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Teknis	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	12000 berkas	2000 berkas izin	2000 berkas izin	3700 berkas izin	185%	-	-	-
	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Sektor A dan B	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	12000 berkas	-	-	-	-	3000 berkas	8700 berkas	73%
	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah kasus pengaduan	210 kasus	20 kasus	35 kasus	20 kasus	57.14%	35 kasus	75 kasus	36%
	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	80;50;90	-	-	-	-	85%	85%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan (kali)	9 kali	-	-	-	-	3 kali	3 kali	33%
	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)	5 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelayanan Perizinan Sektor A (Umum)	Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang diurus masyarakat (surat tugas)	9000 izin	1500 izin	1500 izin	1738 izin	69.52%	1500 izin	4738 surat izin	53%
	Pelayanan Perizinan I Sektor B (Teknis)	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan (Surat Izin)	6000 surat izin	1000 izin	1000 izin	1610 izin	134.17 %	1000 izin	2710 surat izin	45%
	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan (%)	90%	-	-	-	-	85%	85%	94%
	Tim Koordinasi Perizinan	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%
	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan perizinan secara online (berkas)	12000	-	-	-	-	3000 berkas	3000 berkas	25%
	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kali)	340	50 perusahaan	60 perusahaan	90 perusahaan	150%	60 perusahaan	200 perusahaan	59%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah petugas FO pelayanan perizinan	4 org/48bln	-	-	-	-	4 org/12 bln	4 org/12 bln	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B	Tingkat pemenuhan kebutuhsn perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B (%)	500%	-	-	-	-	100%	100%	20%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan realisasi investasi (%)	75%	25%	35%	10%	29%	45%	45%	60%
	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan luar Negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	13 kali	2 kali	2 kali	1 kali	50%	3 kali	6 kali	46%
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah investor (perusahaan)	540	100	90	90	100%	100	100	100%
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM	Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi	270 orang	50 orang	60 orang	50 orang	100%	-	100 orang	37%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tenaga Kerja									
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	65%	55%	57%	57%	100%	60%	60%	92%
	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	96 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	48 orang	50%
	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	65 lembaga	-	13 lembaga	13 lembaga	100%	13 lembaga, 2 lap	26 lembaga, 2 lap	40%
	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan menjahit (orang)	48 orang	-	16 orang	16 orang	100%	16 orang	32 orang	67%
	Pelatihan Montir Elektronika	Jumlah peserta pelatihan montir elektronika (orang)	48 orang	-	16 orang	16 orang	100%	16 orang	32 orang	67%
	Pelatihan Memasak	Jumlah peserta pelatihan memasak (orang)	48 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	48 orang	100%
	Pelatihan Pembuatan Meubel	Jumlah peserta pelatihan pembuatan meubel (orang)	32 orang	-	16 orang	16 orang	100%	-	16 orang	50%
	Monev Eks Siswa Pelatihan	Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	39 orang	-	-	-	-	13 orang	13 orang	33%
	Pelatihan Salon	Jumlah peserta salon (orang)	32 orang	100%	-	-	-	16 orang	16 orang	50%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Ketenagakerjaan	Jumlah sarana pelatihan yang diadakan (set)	16 set	-	16 set	16 set	100%	-	16 set	100%
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	23%	15%	17%	17%	100%	19%	19%	83%
	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)	72 laporan	12 laporan	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 laporan	50%
	Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah peserta WUB tenaga kerja mandiri (orang)	80 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	95%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	100%
	Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHI yang tertangani (kasus)	145 kasus	-	30 kasus	29 kasus	96.67%	30 kasus	59 kasus	41%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)	25 perusahaan	-	5 perusahaan	10 perusahaan	200%	5 perusahaan	15 perusahaan	60%
	Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	PP dan PKB di perusahaan (perusahaan)	80 perusahaan	-	5 perusahaan	5 perusahaan	100%	10 perusahaan	15 perusahaan	19%
	Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	4 posko	-	-	-	-	1 posko	1 posko	25%
	Urusan Pilihan									
	Industri									
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM (%)	12%	2%	2%	2%	100%	4%	4%	33%
	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Jumlah peserta sosialisasi/penerapan Good Manufacturing Practises (GMP) (orang)	32 orang	-	5 IKM	5 IKM	100%	-	5 IKM	16%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	100	5%	10%	10%	100	15%	30%	30%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tahun 2015-2035	Jumlah dokumen yang dihasilkan tentang kebijakan sektor industri (dokumen)	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi	Jumlah peserta pelatihan aneka sulam, membatik, tenun dan lomba produk unggulan daerah serta fasilitasi dengan mitra kerja industri (orang)	150 orang	-	30 orang	30 orang	100%	30 orang	60 orang	40%
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Fasilitasi mitra kerja industri (jumlah rapat kordinasi yang diikuti; jumlah peserta study pembelajaran bagi IKM kerajinan; jumlah peserta pameran)	9;9;12	-	25 org; 15 org; 25 org; 31 org	25 org; 15 org; 25 org; 31 org	100%	3 Rakor	3 Rakor	50%
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)	10%	2%	2%	2%	100%	4%	4%	40%
	Perluasan penerapan standar produk industry manufaktur	Peserta sosialisasi penerapan dan konvensi GKM (IKM)	25 IKM	-	5 IKM	5 IKM	100%	-	5 IKM	20%
		Peserta sosialisasi SNI terhadap produk industri	125 IKM	-	25 IKM	25 IKM	100%	-	25 IKM	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		(IKM)								
	Pengembangan & pelayanan teknologi industri	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah industri makanan yang mendapat fasilitas packing (IKM)	25 IKM	-	25 IKM	25 IKM	100%	25 orang	50 IKM	200%
		Fasilitasi kemitraan industri (IKM)	2 IKM	-	-	-	-	10 IKM	500%	100%
		Fasilitasi label halal terhadap produk industri makanan (IKM)	20 IKM	-	10 IKM	10 IKM	100%	10 IKM	20 IKM	100%
		Fasilitasi SNI terhadap produk industri (IKM)	65 IKM	-	-	-	-	-	-	-
	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri (%)	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aneka kerajinan (orang)	20 orang	-	-	-	-	20 orang	20 orang	100%
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal (%)	35%	100%	7%	7%	100%	7%	7%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Pendataan industri kecil menengah (unit)	2200 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Penambahan penerbitan TDI (unit)	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Monev bantuan mesin peralatan (IKM)	5080 IKM	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah buku data industri (dokumen)	4 dokumen	-	-	-	-	4 buku	4 buku	100%
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	10%	2%	2%	2%	100%	4%	4%	40%
	Penumbuhan sentra potensial	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perkuatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	30; 8 dokumen	-	5 KUB	5 KUB	100%	15;1	20 KUB	67%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada umumnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan. Berikut indikator dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. T-C-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2018

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPMPSTPPTK				Realisasi	Proyeksi		Catt.
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan			84%	86%	88%	90%	75.50%	86%	88%	
2.	Persentase peningkatan realisasi investasi			3%	5%	7%	9%	4.7%	5%	7%	
3.	Tingkat kontribusi sektor industry pengolahan pada PDRB			5.4%	5.6%	5.8%	6%	6.07%	6.1%	6.15%	
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka			5.7%	5.5%	5%	4.93%	6.38%	5.5%	5%	

Namun peningkatan pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dalam hal pengawasan dan pembinaan, baik terhadap masyarakat yang telah kita keluarkan izinnnya maupun bagi masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki izin.
2. Masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi dalam hal penyediaan informasi online bagi masyarakat umum, karena masih terbatasnya jenis izin yang dilayani secara online.
3. Lama proses penyelesaian perizinan sudah diatur dalam SOP (Standar Operasional Pelayanan), namun pelaksanaannya masih sering melebihi

waktu yang ditentukan. Hal ini dikarenakan menunggu rekomendasi dari SKPD Teknis, sehingga terkesan prosesnya terlalu panjang.

4. Lemahnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengimplementasikan peraturan sehingga perlu diadakan workshop untuk pegawai.
5. Ruang Kerja yang kurang luas untuk proses perizinan dan penyimpanan data dan dokumen perizinan.
6. Masih terbatasnya jumlah Industri Kecil Menengah yang dapat dilakukan pembinaan karena keterbatasan anggaran.
7. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ketenagakerjaan masih terbatas baik kuantitas, kualitas sarana dan prasarannya.
8. Pelaksanaan pelayanan dan penempatan tenaga kerja yang masih dilaksanakan secara manual.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simflikasi, Keamanan dan Kepastian.

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai perwujudan pandangan ideal dari hal - hal yang harus dicapai di masa yang akan datang, diperlukan penguasaan informasi tentang masalah - masalah penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja baik dalam lingkungan internal maupun external.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil

yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja serta mempermudah dan mempercepat proses pelayanan (cepat, tepat dan transparan)
2. Pelayanan Perizinan bidang Penanaman Modal yang diberikan DPMPTSPPTK telah dilaksanakan secara On-Line tetapi tetap perlu pengembangan sehingga 81 jenis izin yang dikelola dapat dilayani secara On-Line seluruhnya
3. Perlu penyempurnaan regulasi perizinan dan penyempurnaan SOP (Standar Operasional Pelayanan) sehingga proses pengurusan isi dapat selesai tepat waktu yang akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan sesuai standarisasi yang ada, yang juga perlu didukung dengan penganggaran yang memadai
5. Kebutuhan gedung kantor DPMPTSPPTK disesuaikan dengan jumlah ASN dan sesuai standar pelayanan seharusnya dengan luas 590 m², sedangkan kondisi saat ini 210 m².
6. Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada DPMPTSPPTK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai analisa jabatan seharusnya berjumlah 93 orang, sedangkan kondisi saat hanya berjumlah 61 orang
7. Pembinaan dan pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam meningkatkan IKM yang berkualitas dan berdaya saing
8. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ketenagakerjaan masih sangat terbatas, baik dalam pelayanan dan penempatan tenaga kerja juga sarana dan prasarana pelatihan.

Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya yang realistis.
4. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama SKPD pengelola perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja belum optimal
5. Aplikasi perizinan telah dilaksanakan secara On-Line dan perlu terus dilakukan pengembangan aplikasi serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen;
3. Tertatanya aturan perizinan yang akurat;
4. Lancarnya pelaksanaan pengawasan perizinan;
5. Tersedianya dokumentasi perizinan;
6. Lancarnya pelayanan proses perizinan;
7. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan semua OPD pengelola izin;
8. Tersedianya Sistem Aplikasi Perizinan Online meliputi semua jenis izin yang dikelola;
9. Terselenggaranya publikasi media luar ruangan yang menarik dan persuasif;
10. Terlaksananya promosi investasi dan terwujudnya kerjasama antara Usaha Besar dan UKM;

11. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan terhadap industry kecil dan menengah;
12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas industry kecil dan menengah;
13. Terlaksananya proses pelayanan dan penempatan tenaga kerja yang baik;
14. Meningkatnya perlindungan, penegakkan hokum ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja;
15. Meningkatnya kualitas SDM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Adapun misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Misi 4 yaitu Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna. Dengan tujuan tingkat Kota yang akan dicapai:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi perkotaan yang berkualitas

Adapun sasaran tingkat kota yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Di samping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen renja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Penjabaran dari

rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabelberikut:

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis								
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	46 Jenis	21,744,000			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	46 Jenis	21,744,000		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35,400,000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35,400,000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	11 Jenis	5,000,000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	11 Jenis	5,000,000		
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	12 bulan	20,000,000			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	12 bulan	40,000,000		
		Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	180,000,000			Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	180,000,000		
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	5 org/ 12 bln; 5 org/12 bln	144,690,000			Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	5 org/ 12 bln; 5 org/ 12 bln	144,690,000		
		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	5 paket	25,000,000			Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	5 paket	25,000,000		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMPTS PPTK	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	6,040,000,000			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMPTS PPTK	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	13,596,500,000
		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	25,000,000			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	40,350,000		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis								
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	3 Jenis	15,000,000			Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	3 Jenis	15,000,000		
		Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit	6,000,000,000			Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit	13,541,150,000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DPMPTS PPTK	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	65%	73,520,171			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DPMPTS PPTK	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	65%	73,520,840
		Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 orang	73,520,171			Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 orang	73,520,840		
		Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	DPMPTS PPTK	Peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat (%)	100%	762,573,208			Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	DPMPTS PPTK	Peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat (%)	100%	823,398,737
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan	4 Orang/12 Bulan	225,491,853			Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan	4 Orang/12 Bulan	215,929,797		
		Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	2500 surat izin	67,762,585			Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	2500 surat izin	67,090,680		
		Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	28,429,000			Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	27,929,240		
		Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan	6 dokumen	32,089,000			Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan	6 dokumen	106,840,500		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis								
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	81 Jenis Izin	49,429,000			Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	81 Jenis Izin	48,596,200		
		Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	24,928,000			Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	23,775,000		
		Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	3000 berkas	22,029,000			Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	3000 berkas	21,980,000		
		Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	100,000,000			Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	100,000,000		
		Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	90%	36,363,770			Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	90%	36,284,020		
		Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan	1 Laporan	34,195,000			Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan	1 Laporan	33,783,900		
		Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	90%	58,000,000			Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	90%	57,827,300		
		Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	54,428,000			Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	54,027,000		
		Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	29,428,000			Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	29,335,100		
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	DPMPTS PPTK	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	1	525,657,340			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	DPMPTS PPTK	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	1	367,010,415

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis								
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Kajian penanaman modal	jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM	1 dokumen	525,657,340			Kajian penanaman modal	jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM	1 dokumen	367,010,415		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTS PPTK	Persentase peningkatan realisasi investasi	83,603,261			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTS PPTK	Persentase peningkatan realisasi investasi	10%	79,603,260	
		Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	2 kali	83,603,261			Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	2 kali	79,603,260		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTS PPTK	Peningkatan Jumlah Investor	24,998,591			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTS PPTK	Peningkatan Jumlah Investor	100 perusahaan	24,975,590	
		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	120 laporan perusahaan	24,998,591			Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	120 laporan perusahaan	24,975,590		
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTS PPTK	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	60%	247,968,500			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTS PPTK	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	60%	408,915,220
		Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	16 orang	53,215,900			Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	16 orang	54,885,900		
		Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	10 lembaga	26,811,600			Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	10 lembaga	25,714,000		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis							
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Pelatihan Service Handphone	Jumlah peserta pelatihan service handphone (orang)	16 orang	115,123,000			Pelatihan pembuatan bed cover	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover	16 orang	85,277,660	
		Monev Eks Siswa Pelatihan	Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	64 orang	3,068,000			Monev Eks Siswa Pelatihan	Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	64 orang	3,068,000	
		Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	20 orang	49,750,000			Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	20 orang	23,117,900	
								Pelatihan montir sepeda motor	Jumlah peserta Pelatihan Montir Sepeda Motor	16 orang	100,157,000	
								Pelatihan pembuatan dendeng singkong	Jumlah peserta pelatihan pembuatan dendeng singkong	16 orang	39,401,150	
								Pelatihan modeste dasar untuk pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste	16 orang	77,293,610	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DPMPTS PPTK	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	19%	113,700,000		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DPMPTS PPTK	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	19%	13,685,290
		Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)	12 dokumen	13,700,000			Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)	12 dokumen	13,685,290	
		Job Fair	Jumlah penempatan pencari kerja secara langsung	100 org dan 20 perusahaan	100,000,000							
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DPMPTS PPTK	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	70%	130,000,000		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DPMPTS PPTK	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	70%	135,253,450

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis						
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHI yang tertangani (kasus)	30 kasus	40,000,000			Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHI yang tertangani (kasus)	30 kasus	25,931,850
		Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang terdeteksi	10 perusahaan	35,000,000			Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang terdeteksi	10 perusahaan	11,209,850
		Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang dibina dalam pembentukan PP/PKB	10 perusahaan	35,000,000			Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang dibina dalam pembentukan PP/PKB	10 perusahaan	11,092,750
		Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	1 posko	20,000,000			Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	1 posko	6,869,000
		Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)	4 diklat	100,000,000			Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)	4 diklat	80,150,000
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DPMPTS PPTK Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	15	800,000,000			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DPMPTS PPTK Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	15	532,284,500
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tahun 2015-2035	Jumlah dokumen RPIK (dokumen)	1 dokumen	300,000,000			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tahun 2015-2035	Jumlah dokumen RPIK (dokumen)	1 dokumen	214,420,000
		Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi	Jumlah peserta pelatihan tingkat mahir bordir KK kurang mampu	30 orang	50,000,000			Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi	Jumlah peserta pelatihan tingkat mahir bordir KK kurang mampu	30 orang	19,864,500

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis						
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah peserta magang membuat; jumlah peserta Bimtek AMT; Pameran dalam negeri yang diikuti	5 org; 20 org; 4 event 450,000,000			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah peserta magang membuat; jumlah peserta Bimtek AMT; Pameran dalam negeri yang diikuti	5 org; 20 org; 4 event 298,000,000		
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DPMPTS PPTK	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)	2%	540,000,000	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DPMPTS PPTK	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)	2%	472,926,200
		Perluasan penerapan standar produk industry manufaktur	Peserta sosialisasi penerapan dan konvensi GKM (IKM)	5 IKM 50,000,000			Pembangunan dan pelayanan teknologi industri	Peserta sosialisasi penerapan dan konvensi GKM (IKM)	25 org 35,480,000		
		Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	12 bulan 215,000,000			Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	12 bulan 139,731,200		
		Pelatihan Rendo Koto Gadang	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang	20 orang 75,000,000			Pelatihan Rendo Koto Gadang	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang	20 orang 49,035,000		
		Fasilitasi Kegiatan Dekranasda	Jumlah pengrajin yang difasilitasi	20 orang 200,000,000			Perkuatan organisasi mitra UPTD Kerajinan Industri	Jumlah organisasi mitra UPTD Kerajinan Industri	1 organisasi 248,680,000		
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	DPMPTS PPTK	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	2%	155,000,000	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	DPMPTS PPTK	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	2%	154,980,000
		Penumbuhan sentra potensial	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perkuatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	15;1 100,000,000			Penumbuhan sentra potensial	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perkuatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	15;1 100,000,000		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah KUB Pangan yang dilakukan pendampingan; Jumlah pameran pangan nusantara yang diikuti	4 KUB; 1 event 55,000,000			Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah KUB Pangan yang dilakukan pendampingan; Jumlah pameran pangan nusantara yang diikuti	4 KUB; 1 event 54,980,000

2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil penelaahan usulan kegiatan masyarakat Kota Bukittinggi, Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapatkan usulan berupa program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan hasil informasi penelitian lapangan dan pengamatan.

Usulan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPPTK meliputi program/kegiatan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja. Penjabaran usulan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
1.	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	LUAR KOTA BUKITTINGGI	Jumlah pameran/expo yang diikuti	2 kali pameran	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	BUKITTINGGI	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	1 dokumen	
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat					
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan	4 Orang/ 12 Bulan	
2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 kali	
3	Pelayanan Perizinan Sektor A	DPMPTSPPTK	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	2500 surat izin	
4	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	DPMPTSPPTK	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	
5	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah dokumen aturan perizinan	6 dokumen	
6	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	DPMPTSPPTK	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	81 Jenis Izin	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
7	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	
8	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	3000 berkas	
9	Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B	DPMPTSPPTK	Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B	100%	
10	Pelayanan Perizinan I Sektor B	DPMPTSPPTK	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	
11	Pelayanan Perizinan II Sektor B	DPMPTSPPTK	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	90%	
12	Tim Koordinasi Perizinan	DPMPTSPPTK	Laporan koordinasi perizinan	1 Laporan	
13	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	90%	
14	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	DPMPTSPPTK	Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	
15	Pengawasan Tempat Usaha	DPMPTSPPTK	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
1	Pelatihan Kewirausahaan	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	16 orang/ 9 hari	Usulan Musrenbang Kel. Pakan Labuah
2	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas LLS	DPMPTSPPTK	Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	10 lembaga	
3	Pelatihan Montir Sepeda Motor	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta Pelatihan Montir Sepeda Motor	16 orang	Usulan Musrenbang Kel. Puhun Tembok 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
4	Pelatihan Pembuatan Bed Cover	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover	16 orang	Usulan Kegiatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang 2018
5	Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan pembuatan dendeng singkong	1 Laporan	Pokir DPRD Rusdy Nurman
6	Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan modeste	20 orang	Pokir DPRD Ibnu Asis
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah					
1	Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir KK kurang mampu	30 orang	Pokir DPRD Fauzan Haviz, SE MBA, MALS
2	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta magang membuat; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah pameran yang diikuti	5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	Usulan Musrenbang Kel. Kayu Kubu dan Kel. Tarok Dipo 2018
3	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2015-2035	DPMPTSPPTK	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi	1 Dokumen	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					
1	Pelatihan Rendo Koto Gadang	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang	20 orang	
2	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan*	DPMPTSPPTK	Jumlah organisasi yang difasilitasi	1 organisasi	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja harus merujuk pada sasaran dan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan industri di tingkat nasional. DPMPTSPPTK memiliki 3 kewenangan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal, urusan wajib bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang industri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan Investasi yang Menarik”. Agar tercapainya visi tersebut, BKPM memiliki sejumlah misi yang merupakan bentuk teknis dari visi. Misi-misi tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.
Misi ini mencakup penyediaan rumusan peraturan, undang-undang dan kebijakan penanaman modal.
2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
Misi ini mencakup peningkatan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri serta mendukung terciptanya kesepakatan kerjasama penanaman modal yang sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Meningkatkan fasilitas, pelayanan dan advokasi terkait pelaksanaan penanaman modal.
Mencakup peningkatan kualitas pelayanan serta adanya pengendalian dalam pelaksanaan modal agar realisasi investasi meningkat.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal.

Mencakup peningkatan kualitas pelayanan perencanaan program serta mewujudkan keserasian dalam hubungan masyarakat terkait penanaman modal.

Sedangkan untuk kewenangan urusan pilihan bidang industri, mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Perindustrian. Visi Kemenperin yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengembang misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk arah dan kebijakan nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan yakni sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda dan arah kebijakan pembangunan nasional, yang dirumuskan dengan Nawa Kerja Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal
5. Penguatan wirausaha produktif
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan

8. Peningkatan perlindungan pekerja migran
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepan dengan berpedoman kepada Visi dan Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya nilai investasi.

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
2. Meningkatnya peluang investasi
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
4. Meningkatnya kesempatan kerja

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi;
 11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS;
 12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 13. Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (Security).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Peralatan Kantor;
 2. Pengadaan Perlengkapan Kantor;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 4. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor;
 5. Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK;
 6. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 7. Pengadaan Meubeleur.
 - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.
 - 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi.
 - 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 1. Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri.
 - 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Usaha Besar dan UKM;
 3. Sosialisasi Pemahaman Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Badan Usaha.
 - 7) Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan;

2. Pelayanan Perizinan Sektor A;
 3. Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 4. Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan;
 5. Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online;
 6. Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan;
 7. Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan;
 8. Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B;
 9. Pelayanan Perizinan I Sektor B;
 10. Pelayanan Perizinan II Sektor B;
 11. Tim Koordinasi Perizinan;
 12. Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan;
 13. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data;
 14. Pengawasan Tempat Usaha;
 15. Pengadaan Perangkat Komputer Perizinan;
 16. Pendataan Tiang Kerangka Baliho.
- 8) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
 1. Lanjutan Penyusunan Kajian Sumber Daya Potensi;
 - 9) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 1. Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi;
 2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
 3. Rencana Pengembangan Industri Kota Tahun 2015-2035.
 4. Pelatihan Rendo Koto Gadang;
 - 10) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur;
 2. Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri;
 3. Fasilitasi Kegiatan Dekranasda.
 - 11) Program Pengembangan Sentra-Sentra Potensial
 1. Penumbuhan sentra potensial;
 2. Perkuatan Asosiasi Makanan.
 - 12) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
 1. Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas.
 - 13) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
 1. Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan;

2. Penanganan Kasus PHI;
3. Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI;
4. Asistensi dan Pembinaan Penyusunan PP dan PKB;
5. Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan.

14) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1. Pelatihan Kewirausahaan;
2. Pelayanan, Pembinaan, dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta;
3. Pelatihan Montir Sepeda Motor;
4. Pelatihan Service Handphone;
5. Pelatihan Pembuatan Bed Cover;
6. Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta;
7. Pelatihan Kerajinan Bambu.
8. Monev Eks. Siswa Pelatihan.

15) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

1. Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Job Fair.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, rencana program dan kegiatan DPMPTSPPTK telah disusun berdasarkan pada hasil evaluasi capaian Renja Tahun 2017 dan Perkiraan Capaian target Renja Tahun 2018. Evaluasi ini dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dan inovasi terhadap program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan pada Renja 2019 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rencana kerja berupa rincian program, kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 diuraikan pada Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Non Urusan								
	Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100%	819,244,000			100%	836,078,880
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	DPMPTS PPTK	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,500,000	DAU		175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	3,000,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	DPMPTS PPTK	48 Rekening/ 12 Bulan	80,000,000	DAU		48 Rekening/ 12 Bulan	81,600,000
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	DPMPTS PPTK	8 unit roda 4;14 unit roda 2	190,000,000	DAU		7 unit roda 4;14 unit roda 2	193,800,000
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	DPMPTS PPTK	12 bulan; 12 Jenis	84,910,000	DAU		12 bulan; 12 Jenis	86,608,200
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	DPMPTS PPTK	1 Paket	10,000,000	DAU		1 Paket	10,200,000
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	DPMPTS PPTK	46 Jenis	21,744,000	DAU		40 Jenis	22,178,880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DFMPTS PPTK	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35,400,000	DAU		7 Jenis; 30028 Lembar; 86 Buah	36,108,000
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DFMPTS PPTK	11 Jenis	5,000,000	DAU		11 Jenis	5,100,000
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	DFMPTS PPTK	12 bulan	40,000,000	DAU		12 bulan	40,800,000
	10	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	DFMPTS PPTK	90%	180,000,000	DAU		90%	183,600,000
	11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	DFMPTS PPTK	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	144,690,000	DAU		5 org/12 bln; 5 org/12 bln	147,583,800
	12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	DFMPTS PPTK	4 paket	25,000,000	DAU		4 paket	25,500,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	13,596,500,000			100%	3,598,430,000
	1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	DFMPTS PPTK	12 bulan	81,500,000	DAU		12 bulan	83,130,000
	2	Pengadaan Peralatan Kantor	DFMPTS PPTK	1 jenis	15,000,000	DAU		1 Jenis	15,300,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3	Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik)	Jumlah pembangunan gedung kantor	DFMPTS PPTK	1 unit	13,500,000,000	DAU	1 dokumen	3,500,000,000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	73,520,171		100%	74,990,574
	1	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	DFMPTS PPTK	10 orang	73,520,171	DAU	12 bulan	74,990,574
		Urusan Wajib							
		Penanaman Modal							
		Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)		100%	823,398,737		100%	839,866,712
	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan dan Tenaga Ahli Programmer	DFMPTS PPTK	4 Orang/12 Bulan dan 2 orang	215,929,797	DAU	5 Orang/12 Bulan	220,248,393
	2	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	DFMPTS PPTK	2500 surat izin	67,090,680	DAU	150 surat tugas	68,432,494
	3	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	DFMPTS PPTK	60 kasus	27,929,240	DAU	60 kasus	28,487,825
	4	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan	DFMPTS PPTK	6 dokumen	106,840,500	DAU	1 Dokumen	108,977,310
	5	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	DFMPTS PPTK	81 Jenis Izin	48,596,200	DAU	86 Jenis Izin	49,568,124

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	6	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	DFMPTS PPTK	48 laporan	23,775,000	DAU		48 laporan	24,250,500
	7	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	DFMPTS PPTK	3000 berkas	21,980,000	DAU		3000 berkas	22,419,600
	8	Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	DFMPTS PPTK	1200 surat izin	100,000,000	DAU		1200 surat izin	102,000,000
	9	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	DFMPTS PPTK	90%	36,284,020	DAU		85%	37,009,700
	10	Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan	DFMPTS PPTK	1 Laporan	33,783,900	DAU		1 Laporan	34,459,578
	11	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	DFMPTS PPTK	90%	57,827,300	DAU		85%	58,983,846
	12	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online	DFMPTS PPTK	3000 berkas izin	54,027,000	DAU		3000 berkas izin	55,107,540
	13	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	DFMPTS PPTK	60 kali	29,335,100	DAU		60 kali	29,921,802
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi		55%	79,603,260			65%	81,195,325
	1	Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	DFMPTS PPTK	1 kali	79,603,260	DAU		2 kali	81,195,325
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor		110 perusahaan	24,975,590			115 perusahaan	25,475,102

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	1	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	DFMPTS PPTK	1 dokumen	24,975,590	DAU		1 dokumen	25,475,102
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Peningkatan Jumlah Investor		3 dokumen	367,010,415			4 dokumen	374,350,623
	1	Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM	DFMPTS PPTK	50 dok; 250 CD; 1000 leaflet/brosur	367,010,415	DAU		1 dokumen	374,350,623
		Tenaga Kerja								
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian		62%	408,915,220			64%	195,904,729
	1	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	DFMPTS PPTK	16 orang/ 9 hari	54,885,900	DAU		16 orang/ 9 hari	55,983,618
	2	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	DFMPTS PPTK	10 lembaga	25,714,000	DAU		2 Laporan; 13 Lembaga	26,228,280
	3	Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover	DFMPTS PPTK	16 orang	85,277,660	DAU		16 orang/30 hari	86,983,213

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	4	Monev Eks.siswa Pelatihan	Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	DFMPTS PPTK	1 Laporan	3,068,000	DAU		1 Laporan	3,129,360
	5	Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	DFMPTS PPTK	20 orang	23,117,900	DAU		30 orang	23,580,258
	6	Pelatihan Montir Sepeda Motor	Jumlah peserta Pelatihan Montir Sepeda Motor	DFMPTS PPTK	16 orang	100,157,000	DAU		16 orang/30 hari	102,160,140
	7	Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste	DFMPTS PPTK	16 orang	77,293,610	DAU		16 orang	78,839,482
	8	Pelatihan pembuatan dendeng singkong	Jumlah peserta pelatiba dendeng singkong	DFMPTS PPTK	17 orang	39,401,150	DAU			40,189,173
		Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan		80%	135,253,450			85%	56,205,519
	1	Penanganan Kasus PHI	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	DFMPTS PPTK	30 kasus	25,931,850	DAU		30 kasus	26,450,487
	2	Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	DFMPTS PPTK	10 perusahaan	11,209,850	DAU		10 perusahaan	11,434,047
	3	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Laporan Asistensi dan Pembinaan	DFMPTS PPTK	10 Laporan	11,092,750	DAU		10 Laporan	11,314,605
	4	Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	DFMPTS PPTK	1 posko	6,869,000	DAU		1 posko	7,006,380
	5	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti	DFMPTS PPTK	4 kali	80,150,000	DAU		4 kali	81,753,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja		21%	13,685,291			23%	13,958,997
1	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja	DPMPTS PPTK	12 Laporan	13,685,291	DAU		12 Laporan	13,958,997
	Urusan Pilihan								
	Industri								
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang		20 unit usaha	532,284,500			25 unit usaha	324,221,790
1	Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir KK kurang mampu		30 orang	19,864,500	DAU		30 orang	20,261,790
2	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah peserta magang membuat; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah pameran yang diikuti		5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	298,000,000	DAU		5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	303,960,000
3	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2015-2035	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi (Ranperda)		1 Dokumen	214,420,000	DAU		-	-
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB		6%	154,980,000			8%	102,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	1	Penumbuhan Sentra Potensial		Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah)		15 KUB; 1 IKM	100,000,000	DAU		15 KUB; 1 IKM	102,000,000
	2	Perkuatan Asosiasi Makanan		Jumlah KUB pangan yang dibina; Jml pameran pangan nusantara yang diikuti		4 KUB; 1 event/IKM	54,980,000	DAU		4 KUB; 1 event/IKM	56,079,600
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Penambahan nilai penjualan IKM		6%	472,896,200			8%	482,354,124
	1	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri		Pemenuhan operasional pengelolaan UTD Kerajinan Industri		12 bulan	139,731,200	DAU		12 bulan	142,525,824
	2	Pelatihan Rendo Koto Gadang		Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang		20 orang	49,035,000	DAU		20 orang	50,015,700
	3	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri		Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing		10 lembar; 10 IKM	35,450,000	DAU		10 lembar; 10 IKM	36,159,000
	4	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan*		Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri*		1 Organisasi Dekranasda	248,680,000	DAU		1 Organisasi Dekranasda	253,653,600
							17,502,266,834				7,005,032,375

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANA TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**



**SYAHRIZAL, ST
NIP. 19671212 198602 1 002**